

Duit Puluhan Miliar Masih di PTN

Temuan Audit BPK di Kemendiknas

JAKARTA—Kejanggalan dalam laporan keuangan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) yang ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bersumber dari banyaknya pos pengeluaran. Di antaranya, duit dan aset bangunan yang dikelola perguruan tinggi negeri (PTN).

Kemendiknas ditarget hingga akhir Agustus mendatang untuk menyelesaikan seluruh rekomendasi BPK atas temuan tersebut. Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XDPR yang berlangsung hingga Kamis dini hari kemarin (21/7), Kemendiknas seakan-akan dilucuti. Kementerian berslogan Tut Wuri Handayani tersebut dituntut menjelaskan berbagai

◆ Ke Halaman 7 Kolom 1

Duit Puluhan Miliar Masih di PTN

Sambungan dari halaman 1

keganjilan hasil audit BPK atas anggaran 2010 yang mereka kelola.

Dalam temuan yang berujung kesimpulan disclaimer tersebut, BPK menengarai adanya kejanggalan penggunaan keuangan Kemendiknas Rp763 miliar. Temuan tersebut terdiri atas beberapa pos anggaran. Di antaranya, dana bansos yang belum dikucurkan dan tidak tepat sasaran (Rp69,3 miliar); penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang didapat PTN tidak disetor ke kas negara (Rp25,8 miliar); serta aset tetap yang tidak diinventarisasi (Rp287 miliar).

Seabrek temuan BPK tersebut berujung pada rekomendasi-rekomendasi yang wajib dilakukan Kemendiknas. Meski begitu, Kemendiknas menilai, pihaknya belum mendapat laporan adanya indikasi penyelewengan dana atau korupsi dalam temuan BPK tersebut. Dalam kesempatan itu, Mendiknas Mohammad Nuh

menegaskan bahwa pihaknya mulai menindaklanjuti rekomendasi BPK. Mantan rektor ITS itu menyatakan, per 19 Juli, pihaknya sudah menyelesaikan 63 persen rekomendasi BPK. "Kami optimistis bisa menyelesaikan seluruh rekomendasi sebelum jatuh tempo," ujarnya.

BPK memberikan waktu hingga akhir Agustus kepada Kemendiknas untuk menyelesaikan seluruh rekomendasi. Nuh lantas menyebutkan salah satu contoh penyelesaian rekomendasi BPK. Yaitu, kasus belum ditetapkannya standard operating procedure (SOP) atas pengelolaan dan pelaporan piutang. "Kami telah menginstruksi Dirjen Dikti agar menyusun SOP tentang pengelolaan piutang," katanya.

Karena belum adanya SOP pengelolaan piutang tersebut, tiga kampus negeri memberlakukan pengelolaan piutang berbeda-beda. Tiga PTN itu adalah Universitas Brawijaya, ITS, dan Universitas Negeri Semarang (Unnes). Mereka

sempat terjerat piutang Rp 34,5 miliar. Tidak adanya SOP pengelolaan piutang itu juga berujung pada dugaan adanya penyimpangan Rp 82,8 miliar oleh Universitas Diponegoro, Poltek Semarang, serta Universitas Hasanuddin. Berdasar temuan BPK, tiga PTN itu tidak menyajikan piutang dalam neraca standar akuntansi pemerintah (SAP). "Setelah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK, kasus-kasus itu sudah selesai," ujar Nuh. Supaya persoalan semacam itu tidak terulang, dia berharap SOP pengelolaan piutang bisa segera rampung. Selain itu, masih banyak temuan BPK yang hingga sekarang sedang ditangani. Di antaranya, pengelolaan PNBP di delapan PTN yang belum rampung. Dari kasus itu, pemasukan kampus yang tidak disetor ke kas negara mencapai Rp 25,8 miliar.

Nuh menuturkan, pihaknya sudah menindaklanjuti temuan tersebut. Cara yang ditempuh, antara lain, menginstruksi para

rektor PTN yang bersangkutan untuk mempertanggungjawabkan pemasukan PNBP sesuai undang-undang. Selanjutnya, laporan tanggung jawab tersebut diverifikasi Itjen Kemendiknas. Selain itu, Kemendiknas mempercepat pelaksanaan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum pada PTN.

Menurut Nuh, beberapa kampus memang tidak melapor atau mengirimkan pemasukan dari PNBP. Setelah menerima uang hasil kerja sama dari pemerintah atau perusahaan daerah, uang itu langsung digunakan untuk pengembangan kampus. "Jika dimasukkan ke kas negara, cairnya bisa dalam anggaran tahun depan. Padahal, bisa jadi kampus membutuhkan uang itu untuk pengembangan pendidikan," jelas mantan Menkominfo tersebut.

Intinya, Nuh menegaskan bahwa uang tersebut tidak hilang. Hanya, pelaporan penggunaannya belum ada. (wan/c5/iro)